

# PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN SELINGKAR WILIS

**Ardhana Januar Mahardhani**  
*Universitas Muhammadiyah Ponorogo*  
*Jl. Budi Utomo No. 10. Ponorogo*  
*Telp. (0352) 481124*

*E-mail: sekipjogja@yahoo.co.id*

## ABSTRAK

Kawasan Selingkar Wilis ini terletak melingkar di lereng Gunung Wilis Provinsi Jawa Timur, keberadaan enam kabupaten yang melingkar di Gunung Wilis tersebut mempunyai karakteristik wilayah beserta keunggulan lokal yang berbeda, pada nota kesepahaman yang telah disepakati Kawasan Selingkar Wilis diproyeksikan akan dibangun jalan tembus sehingga memudahkan akses pada tiap kabupaten, terutama untuk pengembangan sektor pariwisata. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kabupaten Ponorogo dalam pengembangan Kawasan Selingkar Wilis, yang terdiri dari apa yang telah dipersiapkan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk kelanjutan pengembangan kawasan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, teknik dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwasanya Kabupaten Ponorogo telah mempersiapkan objek pariwisata dan infrastruktur berupa jalan yang akan dikembangkan tetapi masih banyak bagian yang perlu diperbaiki, selain itu hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo lebih berkomitmen dalam pengembangan kawasan ini, perlu adanya wawasan yang lebih luas tentang pentingnya kerjasama kewilayahan guna mengembangkan perekonomian dan pariwisata daerah yang berdaya saing.

*Kata Kunci: Kerjasama, Daerah, Kawasan, Pariwisata*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan pada dasarnya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu makro, sektoral, dan regional. Dalam skala regional pembangunan dilakukan pada suatu daerah baik kabupaten atau kota. Secara implementasinya pembangunan pada setiap daerah tersebut tidak selalu berjalan dengan sempurna, terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tentunya tidak bisa berjalan sendiri, pasti akan membutuhkan daerah lain yang berada di sekitarnya. Pada pelaksanaannya, kegiatan kerjasama antar daerah akan menjadi satu alternatif solusi dalam memperkecil ketidaksempurnaan pelaksanaannya tersebut pembangunan tersebut. Pola sinkronisasi yang berbentuk kerjasama antar daerah sekarang sedang berkembang antara kota/kabupaten satu dengan yang lain, atau pada provinsi satu dengan provinsi lainnya. Hal ini sangat mendukung proses pengembangan kemajuan masing-masing daerah, apalagi jika daerah tersebut masih dalam satu kewilayahan dengan keadaan geografis, sosial, dan ekonomi yang tidak jauh beda. Melalui pola jejaring, kerjasama di antara subyek pembangunan mulai banyak dilakukan. Keterbatasan sumberdaya, potensi, dan letak geografis adalah beberapa faktor yang semakin menguatkan aspek 'saling ketergantungan' secara kewilayahan di antara daerah-daerah yang bertetangga (Abdurahman, 2014: 53).

Hubungan antar pemerintah atau *intergovernmental relations*, menurut Anderson's (1960: 3) adalah "*an important body of activities or interactions occurring between governmental units of all types and levels*", disini berarti dalam hubungan antar pemerintahan adalah semua bentuk aktifitas atau interaksi yang melibatkan unit-unit pemerintahan di semua bentuk dan tingkatan. Salah satu bentuk *intergovernmental relations* diharapkan akan menjadi sarana untuk membangun dan mengembangkan tindakan kolektif bagi pemerintahan daerah, yang disebut dengan *intergovernmental cooperation*. Dalam *intergovernmental cooperation* diharapkan akan terjadi pada dua orang atau lebih tingkatan pemerintahan yang akan menjalin kerjasama, dalam pelaksanaannya fragmentasi manajerial juga harus dihilangkan sehingga menciptakan pemerataan untuk memenuhi kepentingan publik secara efektif dan efisien.

Kawasan Selingkar Wilis merupakan salah satu deretan pegunungan yang termasuk dalam cincin api pasifik di Provinsi Jawa Timur, kawasan ini melingkar di lereng Gunung Wilis, terdiri dari enam kabupaten, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Madiun, selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan "Tunggal Rogo Mandiri". Keberadaan enam kabupaten yang melingkar di Gunung Wilis tersebut mempunyai karakteristik wilayah beserta keunggulan lokal yang sama, selain pada komoditas pertanian juga pada unggulan pariwisata.

Seperti diberitakan dalam portal resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki, maka Gunung Wilis akan dikelola oleh enam daerah yang terletak disekitarnya. Dalam pelaksanaannya, Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan daerah di Wilayah Selingkar Wilis – Tunggal Rogo Mandiri telah ditandatangani oleh enam kepala daerah yang berada di Kawasan Selingkar Wilis pada tanggal 11 Juni 2014, sesuai dengan latar belakang terbentuknya, maksud dari kesepakatan ini adalah untuk memaduserasikan program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten Ngajuk, dan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pembangunan daerah, sedangkan tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan masalah di atas, maka yang akan menjadi bahasan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan Kawasan Selingkar Wilis. Sedangkan untuk tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui peran yang dilakukan oleh Kabupaten Ponorogo dalam rangka pengembangan Kawasan Selingkar Wilis.

## KAJIAN TEORI

Dimensi wilayah sangat penting karena merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis suatu program atau proyek yang diletakkan dalam perencanaan pembangunan (Adisasmita: 2008). Wilayah dikonotasikan dengan lokasi suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri atau pabrik, perusahaan, dan fasilitas pelayanan, dengan demikian pemilihan atau penentuan lokasi juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan-kegiatan tersebut.

Misra (Djakapermana, 2006) menyebutkan jika pengembangan wilayah merupakan upaya mendorong perkembangan wilayah melalui pendekatan komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial. Djakapermana (2006) menyebutkan bahwa pengembangan wilayah adalah harmonisasi perkembangan wilayah. Banyak cara dapat diterapkan, mulai dari konsep pengembangan sektoral, *basic needs approach* sampai penataan ruang (pengaturan ruang secara terpadu melalui proses pemanfaatan sumber daya alam secara sinergi dengan pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan berkelanjutan).

Albert Hirschmann (Sjarifuddin, 2006) menjelaskan pengembangan wilayah dengan istilah *polarization effect* dan *trickling down effect*. Dia menegaskan, perkembangan suatu wilayah tidak terjadi bersamaan (*unbalanced development*), mengingat wilayah tertentu cenderung lebih cepat perkembangannya dibanding wilayah sekitarnya. Pandangan optimistis Hirschmann menegaskan *trickle down effect* pada gilirannya akan terjadi dari wilayah yang berkembang cepat ke wilayah yang hirarkinya lebih rendah. Selain itu juga oleh John Friedmann (Sjarifuddin, 2006), yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan. Teori Friedmann kemudian populer dengan istilah *center-periphery theory* atau teori pusat pertumbuhan, dimana penetapan pusat-pusat pertumbuhan sebagai prioritas dalam pembangunan diasumsikan akan memberi efek positif bagi pengembangan wilayah belakangnya.

Berdasarkan teori Friedmann, pada awal tahun 1990-an Mike Douglass memperkenalkan model keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*) sebagai salah satu model pengembangan wilayah. Untuk kasus Indonesia, teori Friedmann banyak diikuti sebagai pendekatan pengembangan wilayah mengingat luasnya dan banyaknya desa dan kota yang harus ditangani sementara alokasi dana pembangunan yang tersedia relatif terbatas. Dalam konteks ini, logika pengembangan pusat-pusat pertumbuhan cukup masuk akal (Sjarifuddin, 2006). Disamping itu keterbatasan kapasitas sumberdaya, pada dasarnya kemiskinan dan keterbelakangan kawasan perdesaan bukanlah semata-mata disebabkan terisolasinya kawasan desa ke kota, melainkan juga akibat dari bentuk dan sistem keterkaitan desa dengan kota, yang cenderung mengarah pada hubungan eksploitatif.

Douglas (Rustiadi: 2011) menjelaskan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*) setidaknya dapat dideskripsikan dalam lima bentuk keterkaitan atau aliran utama, yakni: (1) orang/penduduk, (2) produksi, (3) komoditas, (4) modal, dan (5) informasi. Sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. Keterkaitan utama dalam pembangunan spasial

<b>Tipe</b>	<b>Elemen-elemen</b>
Keterkaitan fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan jalan</li> <li>- Jaringan transportasi sungai dan air</li> <li>- Jaringan kereta api</li> <li>- Ketergantungan ekologis</li> </ul>
Keterkaitan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola-pola pasar</li> <li>- Arus bahan baku dan barang antara</li> <li>- Arus modal, keterkaitan produksi-<i>backward</i>, <i>forward</i>, dan lateral</li> <li>- Pola konsumsi dan belanja</li> <li>- Arus pendapatan</li> <li>- Arus komoditi sektoral dan interregional</li> </ul>
Keterkaitan pergerakan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Migrasi-temporer dan permanen</li> <li>- Perjalanan kerja</li> </ul>
Keterkaitan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebergantungan teknologi</li> <li>- Sistem Irigasi</li> <li>- Sistem telekomunikasi</li> </ul>
Keterkaitan interaksi sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola <i>visiting</i></li> <li>- Pola <i>kinship</i></li> <li>- Kegiatan rites, rituals, dan keagamaan</li> <li>- Interaksi kelompok sosial</li> </ul>
Keterkaitan <i>delivery</i> pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arus dan jaringan energy</li> <li>- Jaringan kredit dan financial</li> <li>- Keterkaitan pendidikan, training, dan pengembangan</li> <li>- Sistem <i>delivery</i> pelayanan kesehatan</li> <li>- Pola pelayanan professional, komersil, dan teknik</li> <li>- Sistem pelayanan transportasi</li> </ul>
Keterkaitan politik, administrasi, dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan structural</li> <li>- Arus budget pemerintah</li> <li>- Kebergantungan organisasi</li> <li>- Pola Otoritas-<i>Approval</i>-Supervisi</li> <li>- Pola transaksi inter-yuridiksi</li> <li>- Rantai keputusan politik informal</li> </ul>

(Rondinelli dalam Rustiadi 2011)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kawasan Selingkar Wilis pada Kabupaten Ponorogo. Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat, diantaranya: Bappeda, Staf Pemerintah daerah kecamatan sekitar, kelompok masyarakat, atau lembaga lainnya, masyarakat umum, dan sumber lain yang mendukung Data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) kabupaten ataupun instansi terkait, juga melalui jurnal, buku teks, atau artikel ilmiah lainnya.

Untuk memperoleh data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, analisa data dalam model interaktif ini akan berlangsung secara terus menerus sampai pada data jenuh, ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Pada analisa model interaktif terdapat tiga aktivitas yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, terletak sekitar 200 kilometer di sebelah barat daya ibukota provinsi yaitu Kota Surabaya. Kabupaten ini terletak di koordinat 111° 17' - 111° 52' BT dan 7° 49' - 8° 20' LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup>, sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan.



Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Ponorogo

*Sumber: www.ponorogo.go.id*

Berikut batas wilayah Kabupaten Ponorogo.

Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah)  
 Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek  
 Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, Madiun, dan Nganjuk

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk mempunyai jumlah penduduk 855.281 jiwa yang tersebar di 21 (dua puluh satu) kecamatan dan dibagi lagi atas 279 desa dan 26 kelurahan. Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar Kabupaten Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo, Pasar Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan Jenangan dan pasar-pasar lain yang umumnya buka menurut hari dalam penanggalan Jawa. Selain menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan pasar tersebut juga penting dalam rangka menunjang kegiatan sistem koleksi–distribusi terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan beberapa komoditi pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Ponorogo. Sedangkan fasilitas perdagangan yang berupa pertokoan banyak berkembang di kabupaten ini terutama toko-toko swalayan.

Komoditas unggulan Kabupaten Ponorogo yaitu sektor perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan komoditas unggulannya adalah kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkeh, dan jambu mete. Ketersediaan lahan perkebunan pada tahun 2011 yang sudah digunakan untuk cengkeh seluas 2876 Ha, jambu Mete seluas 1340 Ha, kakao seluas 1723 Ha, kelapa seluas 6108 Ha, kopi seluas 580 Ha, dan tebu seluas 2466 Ha.

## B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

### 1. Persiapan Kabupaten Ponorogo Dalam Menghadapi Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis

Keberadaan Kawasan Selingkar Wilis sebagai kawasan pengembangan yang potensial di Provinsi Jawa Timur bagian barat hal ini menjadi sangat serius untuk ditangani dan dikembangkan oleh masing-masing kabupaten yang dilaluinya, mimpi besar Provinsi Jawa Timur mengembangkan Kawasan Selingkar Wilis sepertihalnya Kawasan Bromo Tengger Semeru menjadi pekerjaan rumah yang besar. Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu kabupaten yang akan melaksanakan dan merasakan imbas dari pengembangan Kawasan Selingkar Wilis ini juga harus berbenah diberbagai sektor strategisnya. Dalam tataran kebijakan, di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012 – 2032, pasal 17 ayat 4 disebutkan bahwasannya akan adanya pengembangan jaringan kabupaten dan jaringan jalan lokal primer sebagai jalan lingkaran antar wilayah kecamatan/kabupaten yang diantaranya adalah pengembangan jalan lingkaran Wilis, Babadan – Ngebel – Pulung – Mlarak – Ponorogo – Pudak – Sooko – Sawoo.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada di Kawasan Selingkar Wilis bagian Kabupaten Ponorogo maka perlu adanya penanganan serius yang dilakukan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang ada di Kabupaten Ponorogo, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pariwisata.

Masing-masing SKPD mempunyai tugas masing-masing, tetapi pada awalnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai andil besar dalam perencanaan tapak yang akan digunakan dalam pembukaan jalan penghubung pada Kawasan Selingkar Wilis.

Hasil identifikasi awal oleh anggota tim sekretariat bersama dari Selingkar Wilis diperoleh data panjang trase jalan yang akan diplot/dikerjasamakan untuk Kabupaten Ponorogo adalah  $\pm 40,400$  km, dari trase jalan sepanjang itu, tidak kesemuanya sudah berbentuk jalan beraspal, jalan makadam, atau jalan rabatan, tetapi juga ada yang masih berupa lahan dan perlu pembebasan, jadi ada yang masih belum terhubung dengan wilayah lainnya. Faktor utama yang menyebabkan belum terhubungnya jalan tersebut adalah kondisi geografis antar wilayah yang berada di perbukitan dan dipisahkan oleh cekungan jurang dan sungai. Selain itu antar wilayah meskipun masih satu desa juga masih dipisahkan oleh kawasan hutan milik Perhutani sehingga belum dimungkinkan untuk dibuka jalan antar desa.

Untuk wilayah Kabupaten Ponorogo trase jalan yang ada sepanjang 400,40 km, yaitu mulai perbatasan dengan Kabupaten Trenggalek yang tepatnya di Desa Masaran Kecamatan Bendungan dan Dusun Buyut Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko dikoordinat  $1110\ 38^{\circ}44.788''E\ 7057^{\circ}6.549''S$ . Selanjutnya menuju Desa Suru Kec Sooko dan Desa Pulung dan Desa Kesugihan Kecamatan Pulung, Desa Gondowido dan Desa Pupus Kecamatan Ngebel. Di desa Pupus Kecamatan Ngebel inilah tempat perbatasan dengan Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun tepatnya pada koordinat  $1110\ 40^{\circ}39.814''E\ 7046^{\circ}27.907''S$ .

Selain sarana penghubung berupa jalan, potensi pertanian yang tersentral dalam kegiatan agropolitan juga terus dikembangkan, Kecamatan Ngebel diproyeksikan menjadi pusat agropolitan Kabupaten Ponorogo, tentunya dengan sudah ditetapkannya Kecamatan Ngebel sebagai sentral dari agropolitan tersebut terdapat beberapa pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya pengembangan sub-terminal agro yang ada, pengembangan varietas tanaman yang semakin beragam juga menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Ponorogo. Selain agropolitan juga dikembangkan pariwisata lokal, adapun potensi – potensi yang ada di sekitar trase jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- 1) Bendungan Waduk Bendo, Kecamatan Sawoo,
- 2) Pemandangan Gunung Bayangkaki dan produksi bahan tambang marmer , Kecamatan Sawoo.
- 3) Potensi wilayah air terjun Pletuk, Jurug, Kecamatan Sooko.
- 4) Wisata religi Sumur Tiban, Goa Bunda Maria, Desa Klepu, Kecamatan Sooko.
- 5) Wisata tanah gambut dan pesona pegunungan di Dusun Pandansari Desa Pudak
- 6) Wisata Alam Telaga Ngebel.
- 7) Air Terjun Seloarejo dan air hangat Toyomarto, Kecamatan Ngebel

## 2. Kendala Dalam Menghadapi Pengembangan Kerjasama Kawasan Selingkar Wilis

Tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Ponorogo dalam rangka mempersiapkan diri dalam melaksanakan pengembangan kerjasama Kawasan Selingkar Wilis ini, diantaranya dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang:

### 1) Bidang Kelembagaan

Kelembagaan ini terkait dengan kebijakan internal tiap instansi yang sering tumpang tindih sehingga keberlangsungan kebijakan itu sendiri kurang efektif, selain itu ego sektoral pada tiap SKPD juga mempengaruhi. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Ponorogo sendiri setiap SKPD mempunyai rencana strategis, Dinas Pariwisata misalnya dalam rangka mendukung terciptanya daya tarik wisata (DTW) dinas tersebut harus memperbaiki sarana infrastruktur jalan penghubung menuju ke lokasi, tetapi pada sisi lain di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum berencana untuk memperbaiki daerah menuju ke lokasi tersebut, akhirnya keberadaan objek DTW menjadi kurang diminati oleh masyarakat.

Selain permasalahan internal tersebut kendala juga didapatkan dari eksternal, yaitu kurang efektifnya kerjasama yang sebenarnya sudah diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur antar kabupaten di Kawasan Selingkar Wilis, nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh enam kabupaten di Kawasan Selingkar Wilis terlihat belum bisa berlanjut ke ranah kerjasama antar daerah. Hal ini juga dikarenakan egoisme daerah yang masih kuat.

## 2) Bidang Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah masyarakat lokal yang akan merasakan akibat dari keberadaan pengembangan Kawasan Selingkar Wilis, meskipun secara umum masyarakat menyambut baik rencana besar pembukaan kawasan ini, tetapi juga tetap ada ketakutan dari masyarakat terkait dengan semakin terbukanya akses masyarakat luar pada kawasan ini, karena masyarakat di Kecamatan Sooko, Kecamatan Pudak, dan Kecamatan Ngebel yang keseluruhannya berada di daerah pegunungan masih sangat kental rasa pedesaannya, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang masih sangat tergantung dengan alam serta dari segi perkembangan sosial juga masih sangat lambat. Selain itu dengan semakin terbukanya akses dan potensi yang ada di Kabupaten Ponorogo, menuntut masyarakat untuk dapat terus berinovasi agar bisa menyesuaikan dengan keadaan yang akan terjadi.

## 3) Bidang Infrastruktur

Bidang infrastruktur berkaitan dengan anggaran daerah, dalam hal ini kendala pokok yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten adalah infrastruktur jalan yang masih belum memadai, banyak yang rusak dan terkesan tidak terurus. Dengan terbukanya akses pada kawasan ini nantinya pemerintah daerah juga harus semakin bisa mencari dana baik dalam APBN atau dana lainnya. Selain terkait dengan jalan kendala lain yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah terkait dengan jembatan, ada satu jembatan penghubung yang ada di perbatasan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun yang tidak layak dan perlu diperbaiki.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat dilihat jika Kabupaten Ponorogo telah mempersiapkan diri dalam rangka pengembangan Kawasan Selingkar Wilis, Kabupaten Ponorogo telah menyiapkan infrastruktur yang bisa digunakan sebagai embrio untuk pengembangan kawasan tersebut, mulai dari sarana jalan serta potensi wisata yang ada, diluar dari itu peran SKPD terkait juga sangat diharapkan, meskipun demikian kendala terkait SKPD ini juga masih ditemui, sebagai contoh adalah kesamaan program kerja. Efektivitas kerjasama antar daerah dalam rangka pengembangan Kawasan Selingkar wilis ini juga harus ditingkatkan lagi, keenam kabupaten harus mempunyai persepsi yang sama dan satu suara, masih adanya ketidaksamaan persepsi menjadi kendala yang dihadapi dalam program pengembangan kawasan ini. Keberadaan masyarakat lokal sebagai subjek merupakan salah satu kunci dalam rangka keberhasilan kegiatan pemerintah daerah, masyarakat diharapkan mampu menerima segala perubahan atas segala hal dalam rangka pengembangan Kawasan Selingkar Wilis.

### Rekomendasi

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan Kawasan Selingkar Wilis ini diharapkan akan memberikan kesan positif. Selain itu tidak henti-hentinya pemerintah daerah harus memberikan masukan dan saran serta sering juga mengadakan *hearing* diantara kelima kabupaten yang lain, dengan SKPD di bawahnya, ataupun dengan masyarakat terkait program pengembangan kawasan ini, agar semua merasakan dan turut andil dalam keberhasilan program pengembangan Kawasan Selingkar Wilis ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, Benjamin. 2014. *Kelemahan Regulasi dan Kebijakan Tumpukan Inovasi Pembangunan Daerah*. Dimuat dalam Jurnal Bina Pembangunan Daerah edisi 2 tahun 2014.
- Anderson, James. 1960. *Public Policy Making: Basic Concept in Political Science*. New York: Praeger University Series.
- Djakapermana, Ruchyat Deni. 2006. *Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW)*. Jakarta: Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI
- Rustiadi, Ernan, dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia
- Syarifudin. 2006. *Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Makalah Kuliah Terbuka Program Magister KAPET, Universitas Hasanudin Makasar